

TESIS

**KEDUDUKAN REKOMENDASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA DALAM DUGAAN PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H

Dr. Charles Simabura, S.,H., M.H

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

Kedudukan Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

(Dhuha Aprilio Kamiko, 2220112039, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unoversitas Andalas, 102 halaman, 2024)

ABSTRAK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga negara independen yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 untuk melindungi hak asasi manusia. Meski memiliki peran penting, Komnas HAM menghadapi tantangan besar, terutama karena rekomendasinya tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, pertama bagaimana Komnas HAM menggunakan instrumen rekomendasi dalam menangani kasus pelanggaran HAM, kedua, bagaimana kedudukan rekomendasi Komnas HAM dalam menangani dugaan pelanggaran HAM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder sebagai data utama dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi atas adanya dugaan atau potensi pelanggaran HAM kepada pemerintah, DPR-RI, swasta, dan pihak lainnya. Kedua, kedudukan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tidak memiliki kewajiban untuk dipatuhi, rekomendasi ini hanya sebatas saran yang tidak memiliki sifat eksekutorial seperti putusan pengadilan yang memiliki daya paksa terhadap pelaksanaannya.

Kata Kunci : Komnas HAM, Rekomendasi, HAM, Pelanggaran HAM.

